

**FUNGSI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)
SEBAGAI BADAN PERENCANA DAN PELAKSANA PEMBANGUNAN
DI KELURAHAN LAKAWAN KABUPATEN DATI II ENREKANG**



BOSOWA

Oleh :

HARIATI

45 86 02 0074

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1991

FUNGSI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)

SEBAGAI BADAN PERENCANA DAN PELAKSANA

PEMBANGUNAN DI KELURAHAN LAKAWAN

KABUPATEN DATI II ENREKANG

H A R I A T I

45 86 02 0074

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Negara Jurusan Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1 9 9 1

PENGESAHAN

JUDUL : FUNGSI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
(LKMD) SEBAGAI BADAN PERENCANA DAN
PELAKSANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN
LAKAWAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
ENREKANG

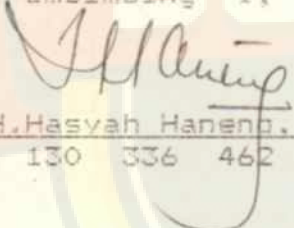
NAMA MAHASISWA : H A R I A T I

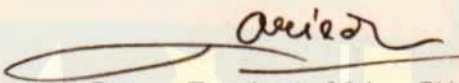
NOMOR STB/NIRM : 4586020074/871133112

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

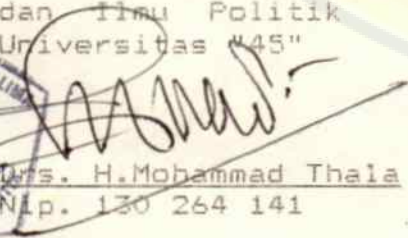

Dra. H. Hasyah Haneng, MPA
NIP. 130 336 462

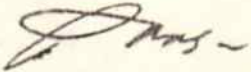

Drs. Faried Ali, SH.MS
NIP. 130 326 967

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Universitas "45"

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Fakul-
tas Ilmu Sosial dan Ilmu
Universitas "45"


Drs. H. Mohammad Thala
Nip. 130 264 141


Drs. H. Sadly AD., MPA
Nip. 130 264 141

Tanggal Pengesahan :

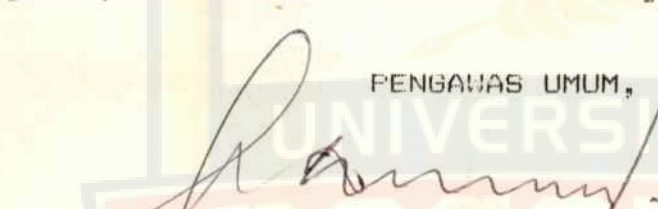
HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI




Pada hari/tanggal : Kamis/21 - 2 - 1991
Skripsi atas nama : H A R I A T I
Nomor STB/NIRM : 4586020074/871133112

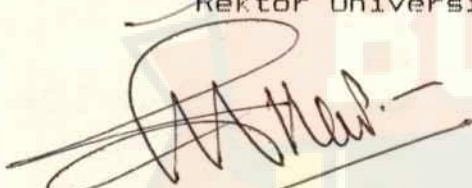
Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Negara pada Jurusan Administrasi Negara.

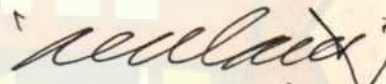
PENGAWAS UMUM,



(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid)
Rektor Universitas "45"


(Drs. H. Sadly Ad. MPA)
Dekan Fisipol Unhas

PANITIA UJIAN


(Drs. H. Mohammad Thala)
Ketua



(Drs. Guntur Karnaeni)
Sekretaris


(Prof. Dr. H. H. Syukur Abdullah)
Anggota

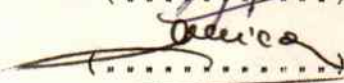
TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullah
2. Drs. Misbahuddin Achmad, MS
3. Drs. La Nafie, M. Ed. Adm.
4. Drs. Faried Ali, SH. MS


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkatNya sehingga dapatlah kiranya penulis menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, guna melengkapi sebahagian syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

Dalam penulisan ini penulis menjumpai banyak kesalahan dan kekeliruan yang demikian mendesak maupun tingkat kemampuan penulis yang masih dalam taraf sederhana dalam menyajikan karya ilmiah ini. Namun demikian, semua hambatan tersebut dapat penulis atasi dengan senantiasa melibatkan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa buah pikiran maupun bantuan materi.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

Ibu Dra.H.Hasyah Haneng, MPA sebagai pembimbing I

Bapak Drs.Farid Ali, SH.MS sebagai pembimbing II

Bapak Drs.Suparman Mekkah, sebagai pembimbing III,

yang dengan segala kerelahan hati untuk meluangkan waktu di dalam membimbing dan memberikan petunjuk kepada kami

sejak awal sampai selesai sebagaimana dalam bentuk seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Andi Zainal Abidin Farid, SH, selaku Rektor pada Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Drs. H. Mohammad Thala, Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. H. Sadly AD., MPA, Ketua Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak Kepala Kelurahan Lakawan beserta stafnya yang telah memberikan banyak yang penulis perlukan begitu juga kepada ketua LKMD Kelurahan Lakawan beserta pengurusnya.
5. Para Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang, yang telah banyak membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama dalam bangku kuliah.
6. Segenap staff/karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang, yang dengan senang hati melayani penulis dalam urusan demi kelancaran studi selama menempuh kuliah.

7. Teristimewa dipersembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang tercinta atas segala pengorbanan, bantuan kasih sayang dan doanya yang senantiasa diberikan selama ini sehingga penulis berhasil di dalam menyelesaikan kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
8. Juga kepada adik serta seluruh keluarga yang tak dapat kami sebutkan satu persatu yang dengan setia dan tabah membantu, baik dimasa kuliah maupun di dalam penulisan skripsi ini.
9. Dan tak lupa juga kepada rekan-rekan mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang yang telah menemani penulis dalam bertukar pikiran demi melengkapi sajian karya ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, meskipun isinya jauh dari kesempurnaan, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita sekalian.

A m i n

Ujung Pandang, Januari 1991

Penulis,

H A R I A T I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa	13
B. Latar Belakang, Dasar dan Tujuan Pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	19
C. Struktur Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	23
D. Tugas dan Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	28
E. Fungsi Perencanaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa	37

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	41
A. Keadaan Geografis	41
B. Keadaan Demografi	43
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan	50
D. Struktur Pemerintah Kelurahan	53
E. Program Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Fungsi LKMD di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja	58
B. Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan-kegiatan Yang Dilaksanakan oleh LKMD Kelurahan Lakawan	72
C. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Kegiatan LKMD di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja	77
BAB V P E N U T U P	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel	Isi	Halaman
1	Luas wilayah Kelurahan Lakawan diperinsi tiap lingkungan tahun 1990/1991	43
2	Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kelurahan Lakawan Tahun 1990/1991	44
3	Klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian di Kelurahan Lakawan Tahun 1990/1991	46
4	Klasifikasi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kelurahan Lakawan Tahun 1990/1991	49
5	Program kerja LKMD Kelurahan Lakawan Tahun 1990/1991	55
6	Keanggotaan LKMD Kelurahan Lakawan Tahun 1990/1991	64
7	Keterlibatan anggota LKMD dalam tahap perumusan perencanaan pembangunan masyarakat desa	66
8	Persepsi responden terhadap kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggung jawab ketua umum LKMD	74
9	Persepsi responden terhadap kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggung jawab ketua I LKMD	75
10	Persepsi responden terhadap kegiatan-kegiatan yang berada dibawah tanggung jawab ketua II LKMD	77

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan desa yang dilakukan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan manusia Indonesia seluruhnya adalah suatu pembangunan yang akan menyentuh kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia dimana lebih dari 80 % penduduk yang bermukim di daerah pedesaan.

Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi rakyat Indonesia, karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh, menyebar luas keseluruh pelosok pedesaan serta dengan menggali segala potensi dan menggerakkan partisipasi masyarakat berusaha memadukan arah pembangunan sektoral dan regional dengan kebutuhan esensial masyarakat itu sendiri.

Upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat telah ditempuh berbagai cara dengan memberikan dorongan meningkatnya desa swadaya menuju desa swakarya menjadi desa swasembada. Pada tingkat desa swasembada inilah diharapkan peranan desa berubah tidak lagi hanya sebagai obyek pembangunan melainkan sekaligus juga menjadi subyek pembangunan.

Dalam rangka mempercepat tercapainya sasaran pembangunan desa tersebut, maka pemerintahan desa memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu perlu adanya keseragaman pemerintahan desa dengan mengindahkan berbagai macam ragam keadaan desa dan ketentuan adat yang berlaku agar pemerintah desa dapat lebih mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan uraian yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sebagai berikut :

" Bahwa sesuai dengan sifat negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan Pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pemerintah dan menyelenggarakan administrasi yang makin meluas dan efektif". (Joko Siswanto, 1988 :77)

Dari uraian tersebut, pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang mana merupakan wadah partisipasi masyarakat pada tingkat desa atau kelurahan, menampung keikutsertaan sebagai partisipasi masyarakat di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Walaupun telah dikeluarkan berbagai macam peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan pembangunan desa, masih terdapat berbagai

hal-hal yang perlu mendapat perhatian secara serius antara lain :

- a. Dewasa ini masih terdapat desa-desa yang terpencil dan terisolasi dari pusat-pusat pembangunan.
- b. Jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang, yaitu ada yang berpenduduk terlalu padat dengan jumlah tenaga kerjanya melebihi daya tampung desa dan ada pula yang berpenduduk terlalu sedikit dibanding dengan potensi desa yang tersedia, sehingga kekurangan tenaga kerja, untuk mengolah potensi tersebut.
- c. Pembangunan desa dan lembaga-lembaga lainnya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- d. Lembaga yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Koperasi Unit Desa (KUD) belum berkembang seperti yang diharapkan.
- e. Tingkat kesadaran dan keterampilan penduduk masih belum memadai, menyebabkan produktifitas dan pendapatan masyarakat masih rendah.

Selain kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut, juga dalam pelaksanaan perencanaan terdapat berbagai macam kendala-kendala baik dalam penyusunan pengelolaan

perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. Dan masih banyak pula masalah yang berkaitan dengan 2 desa seperti peningkatan produksi dan pemasaran, rendahnya tingkat gizi khususnya pada anak balita, masih banyaknya penduduk yang buta huruf, mutu perumahan dan lingkungan hidup yang belum layak dan berbagai masalah lain yang memerlukan pemecahan.

Untuk dapat mengatasi dari berbagai masalah tersebut maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) diciptakan untuk melaksanakan fungsinya membantu kepala kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa.

Tapi kenyataan sekarang ini banyak anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang belum memahami sepenuhnya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Dari berbagai masalah-masalah tersebut yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut serta berbagai masalah yang dihadapi oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka terdoronglah penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul " Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai Badan Perencana dan Pelaksana Pembangunan di

Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang.

B. Batasan Masalah.

Titik berat perhatian penelitian dan pembahasannya adalah mengenai fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai Badan Perencana dan Pelaksana Pembangunan di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980, tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan penggantian nama lembaga-lembaga tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1980. Susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 1980.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) mempunyai kedudukan sebagai lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri, yang bekerja secara sukarela mengabdikan tanpa pamrih bagi kepentingan desanya, yang tergugah dan ingin berbuat sesuatu untuk desanya sehingga mereka dengan kemauan sendiri ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa/kelurahannya.

Disamping itu pula Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 pasal 36 tentang Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa atau Kelurahan di bidang perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun yang bersumber dari swadaya dan gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan di desa/kelurahan yang mantap.

Rumusan masalah yang dimaksudkan adalah untuk lebih menjelaskan secara terperinci mengenai beberapa permasalahannya yang akan diungkapkan melalui uraian berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai perencana dan pelaksana pembangunan desa di wilayah Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja.
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Kelurahan Lakawan.
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di dalam me-

laksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Lakawan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan, akurat serta obyektif tentang pelaksanaan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai Badan Perencana dan Pengawasan pembangunan di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai badan perencana dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Lakawan.
- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Kelurahan Lakawan.
- c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai badan perencana dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Lakawan.

2. Kegunaan Penelitian.

- a. Dengan hasil penelitian ini, nantinya diharapkan dapat memberikan input kepada pemerintah dalam membina dan mengembangkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) khususnya di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang, baik melalui latihan, ketrampilan serta upaya pengembangan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
- b. Dengan hasil penelitian ini, khususnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Kelurahan Lakawan diharapkan dapat memberikan buah pikiran dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan fungsi dan peranannya di masa yang akan datang.
- c. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat lebih mengetahui mengenai teori-teori tentang pelaksanaan pembangunan desa serta fungsi-fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
- d. Khususnya bagi penulis, agar dapat lebih meningkatkan daya pikir yang kreatif dan analisis.

D. Metodologi.

1. Dasar dan Tipe Penelitian.

Adapun dasar penelitian yang penulis gunakan adalah studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan seluruh

permasalahan yang ada di lokasi penelitian seperti halnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), hasil-hasil yang telah dicapai dan lain sebagainya.

2. Teknik pengumpulan data.

Dalam pengumpulan data, penulis gunakan metode penelitian lapangan yang disertai dengan studi kepustakaan.

Adapun teknik pengumpulan data sehubungan dengan metode penelitian tersebut adalah :

a. Teknik wawancara

Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengadakan wawancara langsung dan terbuka, baik secara formal maupun secara informal terhadap informan, dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap beberapa masalah yang perlu digali lebih tuntas. Informan artinya penulis mengadakan wawancara langsung yang tidak dapat diberikan kuesioner. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara lebih dekat tentang sikap informan yang diwawancarai.

Dan wawancara ini pula, penulis lakukan dengan maksud untuk mengetahui berbagai masalah sehubungan dengan tugas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam pelaksanaan pembangunan. Adapun informan yang penulis wawancarai adalah pihak

pemerintah kelurahan di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang.

b. Teknik Observasi.

Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengamati melalui check list pada beberapa kegiatan pembangunan yang terus dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) serta hasil-hasil yang telah dicapai. Penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap pembangunan di kelurahan yang telah disebutkan dengan berpedoman pada check list. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui obyektifitas data yang tertulis dengan kenyataan yang ada di lapangan, dan mengamati faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya faktor alam dan teknis.

3. Teknik Penentuan Sampel.

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah purposive sampel yaitu suatu teknik sampel dengan menentukan/menunjukkan langsung responden yang akan dipilih sebagai sampel dalam penelitian, dengan pertimbangan bahwa sampel yang dipilih adalah mereka yang terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang dipandang sebagai responden.

4. Responden dan informan.

Responden dalam penelitian ini sebanyak 66 orang yang terdiri dari :

a. Kepala Kelurahan	1 orang
b. Anggota LKMD	15 orang
c. Masyarakat	50 orang.

Jumlah	66 orang.

Sedangkan informan adalah petugas-petugas pembangunan desa yang terdiri dari :

- Petugas Bangdes Kecamatan = 1 orang
- Petugas Bangdes Kabupaten = 1 orang

4. Teknik Analisa Data.

Adapun teknik analisa data yang penulis pergunakan adalah analisa kualitatif namun demikian tidak mengabaikan analisa kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi.

E. Sistematika Pembahasan.

Untuk memberikan gambaran sejauh mana ruang lingkup pembahasan karya ilmiah ini yang berjudul "Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai Badan Perencana dan Pelaksana Pembangunan di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang", maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai gambaran umum atau garis-garis besar yang dituangkan dalam tulisan ini :

- BAB I : Penulis mengangkat tema Pendahuluan yang menguraikan atau terdiri atas latar Belakang Masalah, Batasan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Pengertian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa, Latar Belakang, Dasar dan Tujuan Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Organisasi, Fungsi dan Tugas LKMD, Fungsi Perencanaan dan Fungsi Pelaksana LKMD.
- BAB III : Gambaran Umum/lokasi Penelitian yaitu Keadaan Geografis, Keadaan Demografi dan Program Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang.
- BAB IV : Bahasan Hasil Penelitian yang terdiri dari Pelaksanaan Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam Bidang Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa, Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan Kendala-kendala yang Dihadapi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam Pelaksanaan Fungsinya.
- BAB V : Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Tujuan dan Sararan Pembangunan Desa.

Berbicara tentang pembangunan desa, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan desa, pembangunan kota, pembangunan regional/daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan Nasional. Oleh karena itu pembangunan desa ini memegang peranan yang penting dalam usaha untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dari pada keadaan sebelumnya.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor IV/MPR/1978, dinyatakan bahwa perhatian sebesar-besarnya perlu diarahkan dan diberikan kepada peningkatan usaha pembangunan di daerah pedesaan terutama dalam meningkatkan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung bagi pembangunan di daerah pedesaan tersebut.

Namun sebelum penulis lebih jauh berbicara tentang pembangunan desa ini, maka terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian pembangunan desa dimaksud seperti yang dikemukakan oleh Drs. Amas Yamin sebagai berikut :

" Pembangunan desa tidak lain adalah suatu usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintahan terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus, sistimatis dan terarah sebagai satu kesatuan dengan pembangunan regional/daerah dan nasional". (Amas Yamin 1977, : 14)

Berdasarkan kepentingan yang dikemukakan di atas maka cukup jelas bahwa pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional, atau dengan kata lain merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan desa tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh ke seluruh penjuru tanah air tanpa mengecualikan salah satu wilayah tertentu serta mencakup seluruh lapangan hidup dan penghidupan masyarakatnya.

Pembangunan desa ini sebagaimana halnya dengan pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia sebagai hakekat pembangunan nasional, maka pembangunan desa sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional, mencakup pula seluruh aspek pembangunan serta terdiri dari berbagai sektor dan program yang saling kait mengait, dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dengan bimbingan, pengarahan serta bantuan dari pihak pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Selain dari pada itu pembangunan desa diarahkan untuk meletakkan dasar bagi pembangunan nasional yang sehat dan kuat dimana desa adalah merupakan landasan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan dan sebagainya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu bahwa pembangunan desa adalah merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional dengan demikian tujuan pembangunan desa sejalan pula dengan tujuan pembangunan nasional.

Untuk itu sebelum penulis menguraikan secara teoritis tentang pembangunan desa, maka perlu dijelaskan tentang tujuan pembangunan nasional, seperti yang telah ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk :

- "a. Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila.
- b. Di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat.
- c. Dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis.
- d. Dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat, tertib dan damai"



Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka pembangunan desa adalah merupakan bahagian yang integral dari pembangunan nasional atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Namun demikian khusus pembangunan desa telah dirumuskan pula tujuan yang hendak dicapai, berdasarkan atas jangka waktu pencapaiannya yaitu jangka pendek dan jangka panjang sesuai yang termuat dalam buku yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa sebagai berikut :

1. Tujuan jangka pendek adalah untuk menaikkan taraf penghidupan dan kehidupan rakyat khususnya di desa-desa yang berarti menciptakan situasi dan kondisi kekuatan dan kemampuan desa dan masyarakat desa dalam suatu tingkat yang lebih kuat dan nyata untuk tahap-tahap pembangunan selanjutnya.
2. Tujuan jangka panjang adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diroddhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan tersebut di atas adalah merupakan tahapan langkah nyata dari pembangunan yang digiatkan dewasa ini, untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan pembangunan nasional pada umumnya. Sejalan dengan uraian tersebut sebagaimana digariskan dalam Buku II Repelita IV Tahun Anggaran 1984/1985-1988/1989 Propinsi Sulawesi Selatan yang berbunyi :

" Tujuan program pembangunan desa adalah untuk mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada, hingga dengan demikian dapat mengubah kedudukan desa dari penerima pembangunan menjadi pelaku pembangunan ".

Sejalan dengan pembahasan tersebut di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tujuan pembangunan desa hendaknya dapat dicapai :

- a. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dalam segala aspek, baik yang bersifat fisik maupun mental spritual.
- b. Kemampuan yang meningkat dari masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia.
- c. Masyarakat yang tumbuh swadaya gotong royong, kemandirian dan keswasembadaan dalam proses pembangunan di desa atau kelurahan sehingga tidak terlalu tergantung pada pemerintah.

Disamping itu pula, upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat telah ditempuh dengan memberikan dorongan yaitu meningkatnya desa swadaya menuju desa swakarya menjadi desa swasembada. Pada tingkat desa swasembada inilah diharapkan peranan desa berubah tidak lagi hanya sebagai obyek pembangunan melainkan sekaligus juga menjadi subyek pembangunan .

Berdasarkan berbagai masalah yang dikemukakan terdahulu maka sasaran pembangunan desa dapat kita lihat dari dua sasaran antara lain :

1. Sasaran Strategi.

Sasaran strategi pembangunan desa, meliputi wilayahnya sebagai wilayah pemerintahan terendah langsung di bawah camat, adalah mempunyai ciri-ciri tersendiri dengan karakter desa yang bersangkutan. Sejalan dengan tujuan pembangunan dalam rangka pemerataan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kelurahan Lakawan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Soejatmoko :

" Untuk mencapai suatu keseimbangan baru antara kota dan daerah pedesaan, maka pembangunan desa yang meliputi strategi lokasi pembangunan kota-kota pasaran kecil, beserta tehnologi madyanya merupakan unsur-unsur pokok dalam strategi pembangunan".

Sejalan dengan itu maka sasaran strategi pembangunan desa, seperti halnya di Kelurahan Lakawan, dimana diupayakan untuk menciptakan kebersamaan bagi masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan yang meliputi pembangunan fisik dan pembangunan manusianya.

2. Sasaran Aspek.

Sasaran ini menyangkut bidang-bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat menuju terciptanya manusia Indonesia seutunya, karena pembangunan harus ditujukan kepada pengembangan seluruh aspek kehidupan manusia,

baik material maupun spritual yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara bersama-sama dalam satu kesatuan.

Sejalan dengan berbagai masalah tersebut di atas maka pembangunan desa diarahkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial ekonomi yang kuat sebagai landasan pembangunan nasional jangka panjang. Oleh karena itu sasaran pembangunan desa dimaksudkan untuk :

- a. Mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swa-sembada.
- b. Mempercepat pencapaian pemerataan pembangunan dengan jalur pemerataan.
- c. Memberikan saham dalam pertumbuhan ekonomi.
- d. Memantapkan ketahanan nasional.

B. Latar Belakang, Dasar dan Tujuan Pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Pada mulanya di Indonesia telah terdapat suatu Lembaga Sosial Desa (LSD) yang berada di bawah Departemen Sosial. Lembaga ini bertugas menangani masalah-masalah sosial dalam arti sempit seperti masalah kenakalan remaja, karena usaha pemerintah dalam menangani masalah ini sangat terbatas maka tanggal 5 Mei 1952 Lembaga Sosial Desa mulai tumbuh dan berkembang di Desa Pemalang Jawa Tengah.

Pada waktu itu pemerintah melaksanakan berbagai usaha untuk menangani masalah kenakalan remaja dan salah satu usahanya hanya adalah menangani terbentuknya suatu wadah untuk menangani masalah tersebut kemudian dibentuk pilot proyek untuk menangani kenakalan tersebut dan ternyata hasilnya baik, maka sejak saat itulah Lembaga Sosial Desa terbentuk di seluruh desa yang ada di wilayah Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat itu dinamis, oleh karena itu fungsi dari Lembaga Sosial Desa pun perlu ditingkatkan agar tidak mengimbangi dinamisasi dari pada masyarakat yang bersangkutan sehingga Lembaga Sosial Desa tersebut pada prinsipnya tetap berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Masalah-masalah sosial sebagai hasil dari pada interaksi daripada masyarakat sehari-hari bukan hanya kenakalan remaja saja tetapi masih banyak masalah-masalah yang lain yang merupakan masalah sosial seperti pengangguran, buta huruf dan lain-lain. Hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi kelancaran dari pada pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, oleh sebab itu sejak tahun 1972 Lembaga Sosial Desa yang tadinya berada di bawah Departemen Sosial dipindahkan menjadi di bawah Departemen Dalam Negeri yang didelegasikan

pada Kantor Pembangunan Desa sebagai suatu lembaga yang membimbing pelaksanaan serta bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan pembangunan di desa.

Walaupun Lembaga Sosial Desa telah ditingkatkan tapi pemerintah berpendapat bahwa Lembaga Sosial Desa tersebut masih perlu ditingkatkan, dikembangkan dan disempurnakan lagi maka Lembaga Sosial Desa pun diganti menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sebagai dasar atas pergantian ini diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980, sejak dikeluarkannya keputusan tersebut maka Lembaga Sosial Desa diganti namanya menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Cara kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan Lembaga Sosial Desa, hanya bidang dan ruang lingkungannya yang ditangani oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) jauh lebih luas lagi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai dasar hukum pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Sistem Pemerintahan Desa.

3. Surat Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980, tentang Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
4. Surat Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
5. Surat Keputusan Presiden Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Sedangkan tujuan dari pada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980: "Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) bertujuan membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat sehingga masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengemban dan mengembangkan ketahanan di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah".

Jika melihat kedua pasal tersebut di atas maka Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai suatu lembaga yang lokal di desa tumbuh dari masyarakat, dalam arti bahwa kepengurusan lembaga tersebut terpisah dari

kepengurusan pemerintahan desa dan segala hasil dari kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ini ditujukan untuk masyarakat desa itu sendiri.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) membentuk pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil pembangunan dengan jalan menampung aspirasi masyarakat untuk merencanakan pembangunan dan melaksanakan perencanaan tersebut dengan jalan menggerakkan kelompok kerja yang ada dalam masyarakat tersebut.

C. Struktur Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Sebelum mengemukakan struktur organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Lakawan, maka ada baiknya terlebih dahulu kita memahami pengertian dasar tentang "Struktur" itu sendiri.

Drs. Soewarno Handyaningrat, dalam salah satu bukunya yang berjudul *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, mengemukakan :

" Struktur adalah kerangka kerjasama atas dasar pembagian kerja di dalam organisasi. Pembagian kerja ini menentukan wewenang, tugas dan kegiatan orang-orang dalam rangka kesatuan arah dan tujuan". (Soewarno, 1980 : 17).

Dari batasan pengertian Drs Soewarno Handyaningrat ini dapatlah dipahami bahwa struktur adalah

kerangka mana ditentukan secara jelas dan tegas tugas dan wewenang anggota organisasi di dalam rangka mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa semakin besar suatu organisasi maka semakin kompleks pula struktur organisasinya.

Jelas sudah, bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi secara efektif dan tepat, maka diperlukan adanya struktur organisasi yang teratur dan tersusun rapih sehingga semua tugas dan fungsi dapat terlaksana secara tepat.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi LSD menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dinyatakan bahwa LKMD terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga masyarakat yang ada di desa/kelurahan setempat. Adapun susunan organisasinya terdiri dari :

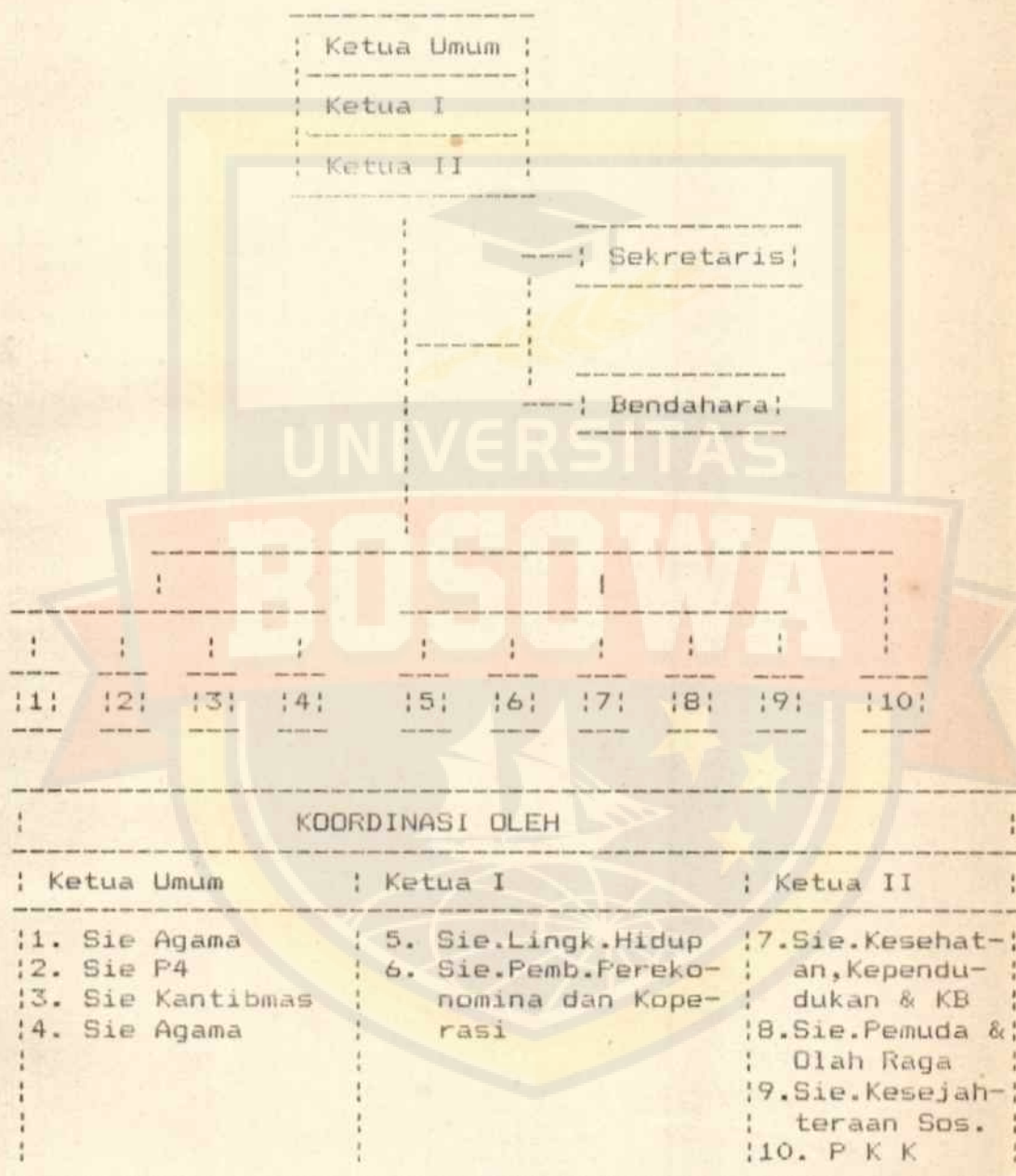
1. Ketua umum yang langsung dijabat oleh Kepala Desa/-Kelurahan itu sendiri.
2. Ketua I
3. Ketua II
4. Sekretaris
5. Bendahara
6. Seksi-seksi.

Seksi-seksi yang terdapat dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) terdiri dari :

1. Seksi agama
2. Seksi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
3. Seksi keamanan, ketentraman dan ketertiban
4. Seksi pendidikan dan penerangan
5. Seksi lingkungan hidup
6. Seksi pembangunan perkenomian dan koperasi
7. Seksi kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana
8. Seksi pemuda, olah raga dan kesenian
9. Seksi kesejahteraan sosial
10. Seksi pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK).

Gambaran lengkap tentang struktur organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dapat dilihat pada bagan berikut :

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
(LKMD) KELURAHAN LAKAWAN 1990/1991



- Uraian Tugas Ketua:

1. Ketua Umum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah merupakan pucuk pimpinan dan penanggung jawab organisasi. Dalam melaksanakan kegiatannya, ketua umum bertanggung jawab kepada kepala kelurahan.
2. Ketua I, adalah membantu pimpinan di dalam mengkoordinir pelaksanaan kerja dari pada seksi-seksi. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua I bertanggung jawab kepada ketua umum.
3. Ketua II, adalah membantu pimpinan di dalam mengkoordinir seksi pendidikan kesejahteraan keluarga, yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bertanggung jawab kepada ketua umum.
4. Sekretaris, adalah membantu pimpinan di dalam tugas-tugas keadministrasian bertanggung jawab kepada ketua umum.
5. Bendahara adalah membantu pimpinan di dalam penyelenggaraan administrasi keuangan, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua umum.
6. Ketua-ketua seksi adalah pembantu pimpinan dan pelaksana kegiatan-kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

- Uraian Tugas Ketua Seksi :

- a. Ketua seksi Keamanan, ketentraman dan ketertiban, ketua seksi pendidikan dan kebudayaan penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan ketua seksi penerangan dalam tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada ketua umum.
- b. Ketua seksi Perekonomian, dan ketua seksi pembangunan prasarana dan lingkungan hidup dalam tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada ketua I.
- c. Ketua seksi agama, ketua seksi pembinaan kesejahteraan keluarga, ketua seksi kesehatan kependudukan dan keluarga berencana, ketua seksi pemuda, olah raga dan kesenian, ketua seksi kesejahteraan sosial dalam tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada ketua II.

D. Tugas dan Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Dalam ketetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja LKMD, pada Bab II, pasal 3 dijelaskan bahwa :

- " Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) mempunyai tugas membantu kepala desa/kelurahan di bidang perencanaan menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu baik yang

berasal dari berbagai kegiatan pemerintahan maupun swadaya gotong royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka mengembangkan ketahanan masyarakat di desa/kelurahan". (Kepres, 1984 : Bab II pasal 3).

Dari penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa tugas pokok dari pada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah membantu kepala desa atau kepala kelurahan dalam :

1. Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas azas musyawarah dan mufakat diantara unsur yang terlibat dalam perencanaan yang dimaksud.
2. Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat desa secara aktif dan positif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat di desa itu sendiri.
3. Menumbuhkan dan terus meningkatkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di desa/-kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya tersebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- b. Menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengalan Pancasila.
- c. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.

- d. Sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri.
- e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
- f. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
- g. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
- h. Membina kerja sama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa atau pemerintah kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap". (Kepres No.28, 1980).

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan fungsinya, berusaha menampung semua inisiatif dan aspirasi masyarakat desa yang akan dipergunakan sebagai bahan perencanaan dari pembangunan. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan satu-satunya wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berarti bahwa segala kegiatan masyarakat, baik yang tergabung dalam lembaga-lembaga maupun yang tidak, yang ada di desa/kelurahan yang dipadukan dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Selanjutnya pula Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berfungsi pula untuk menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila. Perlu digarisbawahi Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indoensia, Dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Kepribadian dan jiwa bangsa Indonesia. Disamping itu, bagi Pancasila sekaligus merupakan tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah suatu kebudayaan yang mengajarkan manusia akan mencapai kebahagiaan, jika dapat dikembangkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Oleh karena itu, penghayatan dan pengamalan Pancasila harus diwujudkan dalam seluruh warga masyarakat, dengan berpegang kepada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Jalur yang dapat digunakan di desa/kelurahan adalah seksi-seksi dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) itu sendiri dan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa/kelurahan. Dalam hal ini, keteladanan, pengendalian diri dari para pemimpin masyarakat, merupakan faktor utama dalam menanamkan pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Di pihak lain fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam pelaksanaannya fungsinya

tersebut maka diharapkan agar dapat memanfaatkan semua kader pembangunan desa (KPD) dan kader-kader teknis lainnya serta tokoh masyarakat seperti tokoh agama, adat, pendidikan dan sebagainya. Teknik motivasi dan pendekatan yang tepat merupakan faktor yang harus diperhatikan bagi berhasilnya usaha tersebut.

Tak kalah pentingnya pula ialah fungsi LKMD dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, dimana di daerah pedesaan telah dirasakan kurangnya lapangan kerja bagi masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dengan teknologi, khususnya teknologi tepat guna, sehingga terbukalah kesempatan kerja yang memadai, sebab berhasil atau tidaknya pembangunan desa tergantung pada peran serta masyarakat, dalam hal ini disamping diperlukan motivasi yang tepat, dibutuhkan pula adanya kemampuan ketrampilan masyarakat.

Usaha meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera, yang merupakan pula salah satu fungsi LKMD yang perlu diwujudkan, dimana gerakan wanita merupakan pula salah satu "ujung tombak" pembangunan di desa, khususnya dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Untuk merealisasikan fungsi tersebut, salah satu seksi yang khusus menangani dari fungsi pokok tersebut adalah seksi PKK.

Disamping itu pula, membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan perlu pula diwujudkan melalui wadah LKMD, oleh karena pemuda adalah merupakan potensi yang turut menentukan berhasilnya pembangunan, yang diharapkan pula memegang "stafet pembangunan dimasa datang" serta menentukan kelangsungan bangsa dan pembangunan dimasa sekarang dan akan datang. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara tepat dan efisien dalam membina potensi pemuda tersebut perlu diperhatikan sikap mental yang diisi dengan jiwa dan nilai-nilai perjuangan pada pemuda tersebut, dengan melalui perkumpulan remaja LKMD.

Fungsi lain yang tak kalah pentingnya pula dari LKMD adalah membina kerjasama antara lembaga yang ada di dalam masyarakat. Hal ini memasukkan agar diperoleh adanya kesatuan gerak, tindakan dan perbuatan serta terjaminnya keserasian, keterpaduan dalam melaksanakan pembangunan. Untuk LKMD perlu membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat dengan menciptakan suasana kerja yang harmonis dengan menggunakan komunikasi sosial yang serasi, sehingga dapat dikoordinasikan lembaga-lembaga yang ada dan terwujud kerja sama antar lembaga-lembaga secara mantap.

Terakhir adalah melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka membantu pemerintahan desa/kelurahan untuk

menciptakan ketahanan yang mantap. Dalam hal ini LKMD berfungsi melaksanakan tugas-tugas antara sistem keamanan lingkungan, menghadapi bencana alam dan pemerataan pelayanan masyarakat.

Fungsi-fungsi LKMD ini lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan 9 fungsi LKMD. Selanjutnya untuk menyelenggarakan fungsinya tersebut LKMD mengusahakan :

1. Terpanuhinya kebutuhan essensial masyarakat seperti : sandang, pangan, papan, dan pendidikan.
2. Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang ada di desa.
3. Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral.
4. Terselenggaranya program pembangunan yang ber-keseimbangan sehingga setiap program kerja adalah merupakan upaya perwujudan masyarakat yang adil dan makmur.
5. Adanya peningkatan perluasan kesempatan kerja pada berbagai bidang usaha.
6. Adanya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
7. Pemerataan pelayanan pemeerinyah kepada masyakarat.
8. Tumbuh dan berekembangnya kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan.

9. Tumbuh dan beerkembangnya kemana dan kemampuan penyesuaian bagi masyarakat terhadap adanya perubahan karena pembangunan dan perubahan ke arah kemajuan.
10. Terjaminnya perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan antara umat beeragama.
11. Terciptanya suatu kondisi tertib dimana masyarakat merasa keamanan dan ketentraman dirinya terjamin.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LKMD dapat membentuk kelompok-kelompok kerja ini berdasarkan pada :

1. Kelompok-kelompok kerja dapat dibentuk berdasarkan pembagian wilayah (dusun atau lingkungan) atau jenis kegiatan.
2. Pada setiap wilayah sesuai keperluan dapat dibentuk beberapa kelompok kerja.
3. Setiap kelompok kerja hanya melaksanakan jenis kegiatan seksi bersangkutan.
4. Kelompok-kelompok kerja tersebut dikoordinasikan oleh seksi-seksi dalam LKMD sesuai dngan bidang tugas masing-masing seksi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LKMD akan mendapat sumber-sumber dana dari :

1. Swadaya masyarakat baik berupa dana dan daya.
2. Bantuan pemerintah baik dari pemerintah daerah



tingkat II, pemerintah tingkat I, maupun dari pemerintah pusat.

3. Bantuan yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kendatipun LKMD telah mempunyai tugas dan fungsi yang cukup jelas serta dana yang cukup untuk memancing swadaya masyarakat, tetapi LKMD masih membutuhkan adanya pembinaan sebagai pembina LKMD antara lain adalah :

1. Menteri Dalam Negeri adalah pembina LKMD yang dalam pelaksanaan sehari-hari dilakukan untuk direktur jenderal pembangunan desa.
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/tamadya Kepala Daerah Tingkat II, Walikota/madya administratif dan camat adalah Pembina LKMD di wilayah masing-masing.
3. Kepala Desa/kelurahan adalah pembina LKMD di desa/-kelurahan masing-masing.
4. Direktur Jenderal Pembangunan Desa atas nama Menteri Dalam Negeri selaku pembina LKMD mengadakan kerjasama dengan departemen-departemen dan lembaga-lembaga non departemen yang secara sektoral mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pembangunan di desa atau kelurahan untuk mengisi serta menggunakan LKMD sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

E. Fungsi Perencanaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, perencanaan adalah merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pelaksanaan selanjutnya. Karena pelaksanaan pembangunan yang baik adalah yang sejauh mungkin mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah direncanakan. Untuk itu jelaslah bahwa perencanaan mutlak harus disusun sebelum pembangunan itu dilaksanakan.

Seperti diketahui bahwa, salah satu fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Untuk itu sebelum pembangunan dilaksanakan, terlebih dahulu disusun perencanaannya, dalam hal ini, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, mula-mula mengadakan persiapan perencanaan, kemudian penemuan masalah dan sumber daya pembangunan.

Setelah kegiatan-kegiatan tersebut telah rampung, maka diadakanlah musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) pada tingkat desa/kelurahan. Hasil musyawarah inilah akan menjadi keputusan desa/-kelurahan dan sekaligus merupakan program rencana pembangunan desa. Adapun fungsi perencanaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah merupakan :

1. Pedoman proses pembangunan yang akan dilaksanakan
2. Program kerja desa/kelurahan.
3. Ketetapan pelaksanaan pembangunan, sebab perencanaan itu dimulai dari bawah dengan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.
4. Perbandingan perencanaan yang dibuat oleh desa dengan perencanaan dari pusat.

Fungsi perencanaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tersebut, merupakan unsur yang sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan, sebab dengan adanya perencanaan yang dibuat oleh masing-masing Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dapatlah diketahui kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak di desa / kelurahan, sehingga pemerintah dapat memprioritaskan pelaksanaannya.

F. Pelaksanaan Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Proses pembangunan yang dilaksanakan di desa/kelurahan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) memegang peranan yang sangat penting, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan maupun pengawasannya.

Untuk lebih efektifnya pelaksanaan proses pembangunan yang dilaksanakan di desa/kelurahan, agar dapat

berjalan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah ditetapkan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) memegang peranan yang sangat penting, sebaba Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) berfungsi sebagai pengendali atau pengawas dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Perlu pula diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak hanya ditentukan pada selesainya suatu pembangunan tetapi juga kualitas hasil yang dicapai. Penilaian merupakan suatu cara mengetahui kualitas hasil pembangunan. Pelaporan pelaksanaan pembangunan merupakan penyampaian informasi mengenai hal yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan tersebut, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) melaksanakan kegiatan :

- a. Menyediakan bahan dan acara evaluasi ke lokasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Melaksanakan evaluasi di lokasi.
- c. Menyusun hasil evaluasi di lapangan.
- d. Menyediakan bahan dan penyampaian acara pertemuan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan akhir kegiatan pembangunan.

e. Penyampaian hasil evaluasi dan laporan akhir hasil pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada ketua umum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Dari kegiatan-kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tersebut, fungsi pengawasan yang dilakukan dalam dimaksudkan untuk menjamin agar pelaksanaan proses pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan serta mengambil tindakan-tindakan bila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa/kelurahan.

BOSOWA



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKISI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Sebelum penulis mengemukakan mengenai geografis Kelurahan Lakawan, terlebih dahulu dikemukakan pengertian dari istilah geografi itu sendiri. Untuk itu maka penulis mengetengahkan pengertian geografis menurut Drs.R.Bintoro dalam bukunya yang berjudul Beberapa Aspek Geografi mengatakan bahwa :

"Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dan unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu".

Dalam kutipan tersebut, maka diketahuilah bahwa geografi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang keadaan muka bumi, bentuk permukaan serta hal-hal yang terjadi di atasnya serta iklim dan sebagainya.

Berdasarkan ini maka penulis mengemukakan beberapa aspek geografi Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang yakni;

Letak dan Luas Wilayah

Pada penelitian ini penulis mengutamakan pada Kelurahan Lakawan yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Siambo.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mataram.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tampo.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bambapuang.

Sebagai realisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka dalam wilayah Kelurahan Lakawan terdapat 4 (empat) dusun/lingkungan yakni :

1. Lingkungan Cakke I
2. Lingkungan Cakke II
3. Lingkungan Pasaran
4. Lingkungan Tontonan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis memberikan gambaran dalam tabel tentang luas wilayah, jumlah RW dan RT-nya sebagai berikut :

TABEL 1
 LUAS WILAYAH KELURAHAN LAKAWAN DIPERINCI TIAP
 LINGKUNGAN TAHUN 1990/1991

No.	Lingkungan	Banyaknya RW	Banyaknya RT	Luas (Km)
1.	Cakke I	2 (dua)	4 (empat)	4,30
2.	Cakke II	2 (dua)	4 (empat)	4,25
3.	Pasaran	2 (dua)	6 (enam)	6
4.	Tontonan.	2 (dua)	4 (empat)	5,20
	Jumlah	8	18	19,75

Sumber : Kantor Kelurahan Lakawan, 1990.

Berdasarkan data di atas jelaslah bahwa luas wilayah Kelurahan Lakawan dapat diketahui dari antara luas lingkungan yang ada dalam wilayah yang bersangkutan, dan ternyata Lingkungan Pasaran merupakan lingkungan yang terluas sedangkan Lingkungan Cakke II merupakan lingkungan yang tersempit wilayahnya.

B. Keadaan Demografi.

1. Klasifikasi penduduk menurut Kelompok umur dan jenis kelamin.

Untuk mengetahui potensi tenaga kerja yang produktif dan yang masih belum produktif, maka jumlah penduduk dapat diklasifikasikan menjadi tiga belas kelompok umur. Sedangkan pembagian jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS
KELAMIN DI KELURAHAN LAKAWAN TAHUN 1990/1991

No.	U m u r (Tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 - 4	240	300	540
2	5 - 9	400	600	1000
3	10 - 14	401	600	1001
4	15 - 19	195	200	395
5	20 - 24	180	280	460
6	25 - 29	195	280	475
7	30 - 34	162	280	442
8	35 - 39	120	240	360
9	40 - 44	190	190	380
10	45 - 49	180	160	340
11	50 - 54	75	180	255
12	55 - 59	68	190	258
13	60 - keatas	71	167	238
; Jumlah		2457	3667	6124

Sumber : Kantor Kelurahan Lakawan, 1990.

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang belum produktif adalah sebanyak 2541, dan yang produktif adalah sebanyak 3345 dan sedangkan yang sudah tidak produktif lagi sebanyak 238. Apabila kita lihat jumlah penduduk antara yang

masih produktif dengan yang tidak produktif lagi terdapat kesenjangan dimana jumlah penduduk yang tidak produktif lebih sedikit dari pada jumlah penduduk yang produktif.

Dengan melihat jumlah penduduk di Kelurahan Lakawan pada tabel tersebut di atas, menunjukkan jumlah yang sangat potensial dalam menunjang proses pembangunan di wilayahnya. Sehingga dengan demikian tugas dan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), untuk memberikan pengertian bagaimana suatu pembangunan serta menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap masyarakat untuk turut serta dalam proses pembangunan, agar pembangunan itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan diharapkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat.

2. Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.

Klasifikasi penduduk menurut mata pencaharian adalah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, yang dihimpun dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan dapat pula menjadi pertimbangan dari sasaran program yang akan dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas telah disebutkan pada bahagian terdahulu bahwa wilayah

Kelurahan Lakawan mempunyai daerah yang berbukit-bukit dan pegunungan, sehingga sawah persawahan agak kurang. Untuk itu mata pencaharian dan penghidupan masyarakat di daerah ini cukup bervariasi.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

TABEL 3

KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
DI KELURAHAN LAKAWAN TAHUN 1990/1991.

No. : Jenis Pekerjaan : Jumlah (orang)

1	: Petani	:	671
2	: Pengrajin	:	7
3	: Pegawai	:	368
4	: Pedagang	:	32
5	: ABRI	:	25

: Jumlah :

1103

Sumber : Kantor Kelurahan Lakawan, Tahun 1990

Dari tabel III tersebut di atas nampak jelas bahwa jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian tetap sebanyak 1103 orang dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian dalam bidang pertanian sebanyak 671 orang dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

- Dalam bidang pengrajin sebanyak 7 orang
- Untuk bidang pegawai sebanyak 367 orang
- Dalam bidang pedagang sebanyak 32 orang
- Dalam bidang ABRI sebanyak 25 orang.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di Kelurahan Lakawan terdapat tenaga pengangguran sebanyak 2253 orang. Keadaan semacam ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius baik dari pemerintah maupun dari warga masyarakat itu sendiri.

Untuk memobilisir tenaga pengangguran tersebut di atas agar bermanfaat bagi pembangunan di desanya pemerintah telah memberikan berbagai macam latihan ketrampilan seperti halnya yang dilaksanakan di Kelurahan Lakawan, kemudian dikoordinasi oleh kecamatan melalui sistem unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) antara lain, meliputi : Kursus menjahit, kursus kecantikan, dekorasi yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK, dan latihan ketrampilan dalam bidang kerajinan tangan seperti yang dilakukan oleh pertukaran atar pemuda dari pulau Jawa di Kelurahan Lakawan. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik karena telah mempunyai Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh dusun/lingkungan bersama Kader Pembangunan Desa (KPD), sehingga mudah dikoordinasi oleh Camat.

Selain usaha tersebut di atas, pemerintah di Kelurahan Lakawan dalam rangka mengurangi tenaga pengangguran di daerahnya, telah dua kali mengadakan transmigrasi yaitu pada tahun 1983 sebanyak 35 KK dan pada tahun 1986 sebanyak 75 KK. Adapun lokasi transmigrasi adalah Daerah Tingkat II Luwu.

3. Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

Faktor pendidikan merupakan salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya pula, baik dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan, maupun pelaksanaan program pembangunan.

Untuk itu di Kelurahan Lakawan menunjukkan angka yang dapat memberikan perhatian khusus kepada seluruh pihak dalam rangka meningkatkan potensi pengetahuan masyarakat, antara lain rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan bahkan menunjukkan adanya angka yang tinggi pada masyarakat yang buta huruf atau buta aksara.

TABEL 4

KLASIFIKASI PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
DI KELURAHAN LAKAWAN TAHUN 1990/1991.

No. ; Jenis/Tingkat Pendidikan ;	Jumlah (orang) ;	Ket. ;
1 ; Buta aksara ;	20 ;	- ;
2 ; Tidak tamat SD ;	1591 ;	- ;
3 ; Sekolah Dasar ;	1862 ;	- ;
4 ; Sekolah Lanjutan Pertama ;	358 ;	- ;
5 ; S L T A ;	779 ;	- ;
6 ; Sarjana Muda ;	6 ;	- ;
7 ; Sarjana Lengkap ;	27 ;	- ;
; J u m l a h ;	4643 ;	- ;

Sumber : Kantor Kelurahan Lakawan, Tahun 1990 /1991

Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya rendah, dimana terlihat adanya 1591 jiwa yang tidak tamat Sekolah Dasar atau belum pernah mengecap pendidikan, untuk itu peranan seksi pendidikan dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sangat di butuhkan, dalam rangka usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, pemberantasan buta huruf melalui pendidikan paket A, dan sebagainya kegiatan dibidang pendidikan, dengan melalui seksi pendidikan dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Disamping itu pula terlihat

adanya masyarakat yang sempat mengecap pendidikan dan berhasil tamat Sekolah Dasar sebanyak 1862 orang, tammat Sekolah Lanjutan Pertama 358 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 779 orang, Sarjana Muda sebanyak 6 orang, dan tamat Sarjana Lengkap sebanyak 27 orang.

Dari kenyataan tersebut telah mendorong perlunya pelaksanaan fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Kelurahan Lakawan, khususnya pada seksi pendidikan denan usaha realisasi fungsinya.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan

Pada pembahasan ini penulis akan mengetengahkan tentang kedudukan, tugas serta fungsi Pemerintah Kelurahan Lakawan sebagai mana hasil penelitian.

Apabila penulis perhatikan tentang kedudukan Pemerintah Kelurahan Lakawan sebenarnya telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan sebagai mana Keputusan Menteri Dalam Negeri No.60 Tahun 1973 yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan Kepala Kelurahan

Kepala kelurahan adalah seorang yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk memimpin pemerintahan yang berada di bawah camat, serta memiliki kesatuan masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan terendah di bawah camat.

Oleh karena itulah sehingga dalam pembangunan di desa/kelurahan, maka kepala kelurahan memegang peranan penting, seperti :

1. Kepala kelurahan sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di wilayahnya.
2. Kepala kelurahan sebagai titik sentral pemerintah yang ada di tingkat kelurahan dalam melayani kepentingan-kepentingan masyarakat.
3. Kepala kelurahan bertanggung jawab kepada pemerintah tingkat atasnya.

Berangkat dari pernyataan di atas maka nampak jelas bahwa penekanannya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri, dan sebagai aparat pemerintah membantu terselenggaranya pelaksanaan pembangunan di desa/-kelurahan dengan penuh tanggung jawab.

2. Tugas Pemerintah Kelurahan.

1. Menjalankan urusan-urusan pemerintahan kelurahan.
2. Menjelaskan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun dpemerintah daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya.

3. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa/kelurahan.

Sedangkan fungsi dari pada pemerintahan kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan segala urusan pemerintahan di kelurahan.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayahnya.
3. Melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4. Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Melaksanakan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa.
6. Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangganya.

Dengan melihat penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka kepala kelurahan adalah penguasa tunggal di dalam pelaksanaan pemerintahan bersama-sama dengan pembantunya. Kepala kelurahan adalah pelaksana dan penyelenggara urusan-urusan pemerintahan. Meskipun demikian dia dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa menuruti keinginannya sendiri, akan tetapi dibatasi dengan peraturan-peraturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah tingkat atasnya.

D. Struktur Pemerintah Kelurahan

Dalam mengemukakan tentang struktur organisasi dan hubungan tata kerja Kantor Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja, maka sebelumnya penulis ingin mengetengahkan pengertian dari pada struktur organisasi menurut pendapat Drs. Manullang yang mengemukakan bahwa "Struktur organisasi adalah susunan yang terdiri dari atas satuan-satuan organisasi bersama segenap para pejabat kekuasaan tugasnya dan hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu" (Manullang, 1986 : 15).

Selanjutnya dalam struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1973, bahwa Kepala Kelurahan bertugas sebagai administrator pembangunan dan dibantu oleh beberapa staf, sehingga tugas yang dibebankan dapat berjalan dengan sempurna sebagaimana diharapkan.

Untuk lebih jelasnya, penulis mengetengahkan susunan/struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan yang ada di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Dati II Enrekang.

Struktur atau susunan organisasi Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Anggeraja dalam hubungan tata kerjanya adalah setiap bagian masing-masing mempunyai tugas

yang harus mereka jalankan, posisi atau fungsi yang harus dikerjakan secara bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis mengetengahkan struktur organisasi Pemerintah Kelurahan Anggeraja Sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN
LAKAWAN KECAMATAN ANGGERAJA

Kepala Kelurahan

Sekretaris Kelurahan

|Kaur Pemth| |Kaur Umum| |Kaur Pemb| |Kaur Keu| |Kaur Ekonomi|

Sumber : Kantor Kelurahan Anggeraja, Tahun 1990

E. Program Kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Program kerja dan realisasi dari program kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 5

PROGRAM KERJA LKMD KELURAHAN LAKAWAN

TAHUN 1990/1991

No.	Lokasi proyek	Jenis Proyek	Biaya (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1	Cakke I, II dan Pasaran	Penataan pipa & pemasangan meteran air	25.000.000.	APBD TK II
2	Pasaran	Pembukaan jalan (batu gunung)	2.500.000.	Swadaya masyarakat
3	Pasaran	Pemagaran & pembukaan kebun baru Kelurahan	3.000.000.	Inpres & swadaya
4	Cakke II dan Pasaran	Pembibitan salak Bali & Jamu Mente	1.000.000.	sda
5	Cakke I	Rehabilitasi Kantor Kel. Lakawan	12.500.000.	Dana Pusat
6	Cakke I	Rehabilitasi rumah jabatan Kepala Kel. Laka	2.500.000.	Pungutan LKMD
7	Pasaran	Pelebaran jln poros Pasaran Cendana	70.000.000.	Pemda TK II Enrekang

1	2	3	4	5
8	Cakke I dan Tontonan	Pengaspalan poros Cakke-Baraka	150.000.000.	Proyek APBD Tk. I
9	Cakke I dan Pasaran	Pengaspalan jalan A. Yani, pendidikan & Sungai Mata Allo	5.000.000.	APBD TK II
10	Cakke I, II	Lanjutan pembukaan Jalan poros Cakke-Sossok	3.000.000.	Swadaya gotong royong masyarakat
11	Tontonan	Pembukaan jalan poros Tontonan Bantunani	2.500.000.	Gotong royong masyarakat
12	Tontonan dan Pasaran	Penanggulangan kritis	25.000.000.	APBD TK II swadaya masyarakat
13	Semua lingkungan	Rehabilitasi tempat ibadah (masjid)	11.000.000.	Bantuan Pemda & swadaya
14	Cakke I	Pembuatan panggung	1.000.000.	Swadaya
15	Cakke I	Pemb. pelataran tempat untuk cara	3.000.000.	Swadaya
16	Semua Lingkungan	Rehabilitasi ringan gedung SD	3.600.000.	Dinas P & K

1	2	3	4	5
17	Pasaran	Penataan Taman segi Tiga	500.000.	Swadaya
18	Semua Ling- kungan	Pembangunan PKK	500.000.	Bantuan PKK
19	Semua Ling- kungan	Pel.Bulan Bakti LKMD	400.000.	Bangdes + Swadaya
20	Pasaran & Kak	Pembinaan AED u/Kep.Pemda Cadangan pem- bangunan	500.000. 560.000.	Anggaran Bangdes Sisa Anggaran
21	Semua ling- kungan	Penataran	1.500.000.	Proyek 1987
Jumlah			32.660.000.	

Sumber : Sekretaris Kelurahan Lakawan, 1990

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi LKMD di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja.

1. Badan Perencana Pembangunan Desa.

Dengan adanya perencanaan dalam proses pembangunan desa, tentunya apa yang diharapkan paling tidak akan dapat diwujudkan, sekalipun belum sepenuhnya mencapai sasaran-sasaran yang telah direncanakan, sebab bukan tidak mungkin pelaksanaannya akan mengalami hambatan-hambatan.

Oleh karena itu di dalam penyusunan rencana perlu disusun secermat dan seteliti mungkin dengan melibatkan masyarakat desa, dan tokoh masyarakat yang terhimpun dalam suatu wadah yang disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Melalui lembaga inilah keputusan-keputusan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan dilahirkan. Dengan demikian dalam pembangunan desa, jika sistem perencanaan pembangunan dilakukan dengan tidak memperhatikan cara-cara perencanaan yang seharusnya maka pelaksanaannya kelak akan kurang menyentuh kepentingan masyarakat.

Para perencana pembangunan di tingkat bawah dan pelaksana pembangunan di lapangan, sebagai

manusia biasa kadang-kadang ada pula yang merasa perlu turut secara langsung menikmati apa yang dapat meningkatkan taraf hidup bahkan merasa perlu untuk meningkatkan kemakmuran pribadi mereka. Sehingga kadang-kadang terdapat diantara oknum-oknum pejabat yang menggunakan jabatan serta mempergunakan dengan baik kelemahan pengawasan, dengan mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan sendiri yang menyimpang dari ketentuan administrasi yang baik. Hal ini dapat merugikan kepentingan pembangunan yang berarti merugikan perencanaan pembangunan umum dan negara. Oleh karena itu proses perencanaan pembangunan di desa, dilakukan dalam tahap kegiatan yang berlangsung dalam wadah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Dalam upaya melaksanakan pembangunan desa, telah diketahui bahwa hanya akan berhasil jika dilaksanakan dengan mekanisme yang tepat. Dalam Intsruksi Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1981 tentang mekanisme pengendalian pelaksanaan program masuk desa, dapat disimak makna bahwa pelaksanaan pembangunan di pedesaan diselenggarakan dengan mekanisme perencanaan dari bawah dan sekaligus disertai pengendalian dari atas terhadap semua program pembangunan yang masuk ke desa yang berasal

dari APBN maupun APBD serta dari prakarsa dan swadaya masyarakat. Dengan demikian maka mekanisme pelaksanaan pembangunan di pedesaan dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dengan pola tersebut, dan meningkatkan koordinasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan daripada semua program sektoral yang masuk ke desa dengan mekanisme kerja sebagai berikut :

1. Rencana/usulan proyek dari desa/kelurahan disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dengan bimbingan dari Camat dengan dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan kecamatan. Rencana/usulan proyek dari desa/kelurahan tersebut dipersiapkan dan diolah dari bahan-bahan usulan perencanaan yang diajukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang oleh kepala desa/kelurahan diajukan kepada Camat.
2. Semua rencana/usulan proyek dari desa atau kelurahan yang telah diterima oleh Camat kemudian dibahas bersama dengan instansi-instansi yang ada di kecamatan melalui diskusi UDKP dan atau Temu Karya LKMD tingkat kecamatan, dan dapat dilengkapi pembahasannya dalam forum koordinasi lainnya dengan bimbingan Bappeda Tingkat II dan Kepala Kantor Pembangunan Desa

kabupaten. Hasil rapat UDKP tersebut selanjutnya disusun dalam suatu bentuk usulan kegiatan pembangunan kecamatan. Usulan kegiatan pembangunan tersebut selanjutnya diajukan oleh camat kepada bupati kepala daerah.

3. Rencana/usulan proyek yang telah diterima dari tingkat kecamatan oleh Bupati, oleh Ketua Bappeda dan Kepala Kantor Pembangunan Desa kabupaten diolah dan kemudian dibahas bersama dengan semua instansi yang ada di kabupaten dalam rapat koordinasi daerah pembangunan desa tingkat II (RAKORDA BANGDES TK II). Hasil pembahasan tersebut dengan berpedoman kepada Repelita Daerah Tingkat II, dituangkan dalam satu rencana/usulan proyek dari kabupaten untuk kemudian diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
4. Rancana/usulan proyek yang diterima dari tingkat kabupaten oleh Gubernur dengan dibantu oleh Bappeda tingkat I dan Kepala Direktorat Pembangunan Desa diolah dan kemudian dibahas bersama dengan semua instansi yang ada di propinsi bersangkutan, dalam rapat koordinasi daerah pembangunan desa tingkat I (RAKORDA BANGDES Tingkat I).

Hasil pembahasan tersebut dengan berpedoman kepada REPELITA Daerah Tingkat I, dituangkan dalam suatu rencana/usulan proyek dari propinsi daerah tingkat I untuk kemudian diadakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan pembangunan wilayah dalam forum konsultasi BAPPEDA, untuk selanjutnya diajukan kepada BAPPENAS dan Departemen Dalam Negeri cq Direktorat Pembangunan Desa Direktorat Jendral Pembangunan Daerah.

Dalam perencanaan pada tingkat desa/kelurahan disusun oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan bimbingan Camat dengan dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa kecamatan.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan mengikut sertakan segenap lapisan masyarakat dipedesaan serta pelaksanaan pada tingkat kelurahan/desa sehingga pada gilirannya untuk mengetahui peranan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai badan perencana pembangunan di tingkat desa dapatlah diperoleh lewat keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam kelembagaan serta dalam tahapan kegiatan perumusan perencanaan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat bukanlah

dimaksudkan sebagai suatu lembaga dimana seluruh masyarakat menjadi anggotanya tetapi secara fungsional dapat mewakili lapisan-lapisan masyarakat yang ada di setiap desa/kelurahan.

Lapisan-lapisan masyarakat dapatlah dilihat secara fungsional melalui status dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dan ini akan dicerminkan oleh tokoh-tokoh fungsional dalam masyarakat desa/kelurahan.

Di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang tokoh-tokoh fungsional ini banyak dan nampak dalam berbagai status dan kedudukannya di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terjata tokoh masyarakat yang ada terdiri dari tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pedagang, tokoh petani, pegawai negeri.

Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat diharapkan mencerminkan keanggotaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di Kelurahan Lakawan. Akan tetapi di dalam kenyataan, menunjukkan seperti apa yang disampaikan anggota LKMD dalam tabel berikut.

TABEL 6

KEANGGOTAAN LKMD KELURAHAN LAKAWAN

No.	Bidang Kegiatan	Wakil tokoh masyarakat dari :					Jumlah
		Agama	Pendidik	Pedagang	Petani	PN.	
1	Keamanan, ketertiban, agama, P4	1	4	-	-	-	5
2	Kesehatan, kependudukan, PKK	-	3	-	-	2	5
3	Ekonomi, lingkungan hidup	-	-	-	-	5	5
Jumlah		1	7	-	-	7	15
		(6,7)	(46,7)			(46,7)	(100)

Sumber : Olahan data primer, Desember 1990.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tidak semua tokoh dalam masyarakat terwakili dalam Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) hanya terdiri dari 6,7 % tokoh agama, 46,7 % tokoh pendidik dan 46,7 % tokoh pegawai negeri. Tokoh pedagang dan petani nampaknya tidak terwakili, sehingga kebutuhan dari sebagian masyarakat kelurahan tidak tercerminkan pada perencanaannya yang dilakukan oleh LKMD.

Mengenai bobot perencanaan yang dicerminkan dengan ketepatan kebutuhan yang diperlukan

masyarakat telah dipenuhi oleh keharusan camat dan petugas urusan pembangunan desa baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten dalam menuntun kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sesuai tuntutan sistem perencanaan Botton up Top Down Planning disebutkan di atas. Dan telah dilaksanakan dengan baik di Kelurahan Lakawan.

Akan tetapi walaupun bobot perencanaan itu dituntun dengan petunjuk camat dan aparatnya, namun dalam proses perencanaan selanjutnya tidak melibatkan sepenuhnya anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) maka hasilnya pun tidak akan memuaskan.

Di Kelurahan Lakawan ternyata keterlibatan anggota dalam proses perumusan kebijaksanaan atas sesuatu kegiatan pembangunan yang dilakukan nampak dalam tabel berikut :



TABEL 7

KETERLIBATAN ANGGOTA LKMD DALAM TAHAP PERUMUSAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

(n = 17)

No.	Tahap Kegiatan	Keterlibatan	
		Terlibat	Tidak terlibat
1	Tahap perkiraan kebutuhan	5 (29,4)	12 (70,6)
2	Tahap perancangan kebutuhan/kegiatan	5 (29,4)	12 (70,6)
3	Tahap perumusan perencanaan	7 (41,1)	10 (58,8)
4	Tahap perumusan keputusan kegiatan	11 (64,7)	6 (35,3)
Jumlah		7 (41,7)	10 (58,3)

Sumber : Olahan data primer, Desember 1990.

Dari tabel ini terlihat bahwa keterlibatan anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam tahap perumusan perencanaan pembangunan hanyalah sebesar 41,7 % , sedangkan 58,3 % ternyata tidak terlibat

Besarnya keterlibatan tersebut (41,7 %) nampak bahwa anggota-anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dilibatkan terbanyak pada tahap perumusan keputusan dan perumusan perencanaan

yaitu 64,7 % dan 41,7 % dari jumlah anggota. Ini berarti fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai badan perencanaan pembangunan di Kelurahan Lakawan hanyalah 41,1 % dari fungsi sebenarnya.

2. Badan Pelaksana Pembangunan Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa adalah merupakan tindak lanjut dari pada keputusan yang telah dirumuskan dalam rencana suoaaya dapat tercapai hasil dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan bantuan pembangunan desa dapat dikemukakan sebagai berikut.

Setelah daftar usulan rencana proyek yang telah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II, selanjutnya diberikan kepada lurah sebagai pimpinan proyek. Dan setelah bantuan keuangan telah diterima oleh lurah segera mengatur pembagian tugas pelaksanaan proyek sebagai berikut :

- Pimpinan proyek bertugas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proyek secara keseluruhan.
- Pelaksanaan harian proyek yaitu ketua I LKMD yang

bertanggungjawab sehari-hari terhadap pelaksanaan proyek (fisik).

- Sekretaris LKMD sebagai sekretaris proyek, bertugas dan bertanggungjawab terhadap administrasi tata usaha dan laporan fisik/keuangan proyek.
- Sekretaris kelurahan sebagai pemegang kas proyek yang bertugas dan bertanggung jawab dalam hal :
 - (1) Menerima, menyimpan dan membayar uang bantuan pembangunan desa.
 - (2) Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan bantuan pembangunan desa dan buku pembantu lain yang diperlukan; dan
 - (3) Membuat surat pertanggung jawaban uang bantuan pembangunan desa dengan dilampiri bukti-bukti yang sah.
- Ketua seksi LKMD sebagai pembantu pelaksana proyek, bertugas dan bertanggungjawab terhadap realisasi swadaya gotong royong masyarakat baik berupa uang, tenaga maupun materiil sesuai dengan rencana serta penyelenggaraan administrasi.

Dalam pekerjaan pembangunan fisik proyek dilaksanakan secara gotong royong sesuai dengan rencana yang telah disahkan, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai penggerak dan pelaksana dalam pembangunan fisik.

Lurah yang bersangkutan sebagai pimpinan proyek selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan proyek telah selesai dibangun sejak bantuan diterima.

Setelah pembangunan fisik proyek selesai 100 %, lurah dalam hubungannya dengan pelaksanaan proyek, diwajibkan membuat laporan dan berita acara untuk disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Laporan pertanggungjawaban keuangan dilampirkan bukti-bukti pengeluaran dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk disampaikan kepada :

- Bupati kepala daerah tingkat II, melalui kepala kantor pembangunan desa kabupaten setelah diketahui dan diteliti atas kebenarannya oleh camat.
- Arsip kecamatan
- Arisp desa.

Laporan pelaksanaan fisik dan keuangan bantuan pembangunan desa dibuat rangkap 3 (tiga), rangka 2 (dua) disampaikan kepada :

- Camat
- Arsip/kelurahan.

Berita acara penyelesaian proyek dibuat rangkap 3, yang ditandatangani oleh lurah bersama

pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) untuk disampaikan kepada :

- Bupati kepala daerah tingkat II melalui camat.
- Arsip kelurahan.

Camat setiap bulan membuat daftar laporan pelaksanaan pembangunan fisik proyek dan keuangan dari kelurahan yang telah menyelesaikan proyeknya.

Laporan dibuat rangkap 2 (dua) untuk disampaikan kepada :

- Bupati kepala daerah tingkat II melalui kepala kantor pembangunan desa kabupaten.
- Arsip.

Setelah laporan pertanggungjawaban keuangan serta bukti-bukti yang sah diteliti atas kebenarannya dan diketahui oleh Camat, kemudian disampaikan kepada bupati kepala daerah tingkat II untuk disahkan.

Bupati kepala daerah tingkat II membuat :

- Laporan pengesahan rencana proyek dengan daftar rekapitulasinya.
- Laporan penyaluran bantuan
- Laporan pembangunan pembangunan fisik dan keuangan masing-masing laporan dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk disampaikan kepada :
 1. Gubernur kepala daerah tingkat I melalui kepala direktorat pembangunan desa propinsi.

2. Tembusan disampaikan kepada :

- Inspektorat wilayah daerah tingkat I
- BAPPEDA TK I.
- Direktorat pembangunan desa propinsi
- Unit perencana kabupaten daerah tingkat II
- Arsip.

Bupati kepala daerah tingkat II membuat pertanggung jawaban dan 1 lembar tanda bukti pemeriksaan, 1 lembar dikembalikan kepada kelurahan. Dalam hal ini bupati dapat melimpahkan wewenangnya kepada kepala kantor pembangunan desa kabupaten.

Di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja, pelaksanaan pembangunan desa dilihat dari pemenuhan tuntutan administrasi dijelaskan di atas dapatlah dikatakan baik. Oleh karena seluruh tuntutan prosedur administratif terpenuhi.

Akan tetapi berdasarkan keterangan para informan, ternyata kebijaksanaan implementasi terfokus pada lurah. Keuangan yang seharusnya berada di tangan sekretaris lurah hanya secara formil demikian, namun secara materiil penguasanya tetap berada di tangan lurah.

Kebijaksanaan penggunaan untuk biaya pembangunan pada nyatanya tetap berada di tangan

lurah. Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ditugaskan untuk itu hanyalah sekedar persyaratan formil, apalagi anggota yang ditugaskan itu adalah aparat lurah yang kebetulan ditunjuk menjadi anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) mewakili pegawai negeri.

Demikian pelaksanaan pembangunan desa di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang yang menjadi tanggung jawab LKMD dimana ketuanya ternyata adalah lurah itu sendiri.

B. Persepsi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LKMD di Kelurahan Lakawan.

Kegiatan-kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dicerminkan oleh banyaknya seksi dalam struktur organisasi LKMD sebagaimana diungkapkan pada bab dua terdahulu.

Seksi-seksi yang ada dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tanggung jawab koordinasi pimpinan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).

Seksi agama, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, keamanan ketentraman dan ketertiban serta pendidikan dan penerangan berada di bawah tanggung jawab dan koordinasi ketua umum.

Seksi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, berada di bawah tanggung jawab dan koordinasi ketua I. Dan seksi kesehatan dan kependudukan, pemuda, olah raga/kesehatan, kesejahteraan sosial dan PKK berada di bawah tanggung jawab dan koordinasi ketua II.

Baik tidaknya pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing koordinator akan tercermin pada manfaat dan kegunaan kegiatan itu bagi anggota masyarakat.

Akan tetapi manfaat atau kegunaan sesuatu kegiatan tidaklah dapat diukur secara matematik tetapi hanya dapat dideteksi melalui persepsi masyarakat terhadap kegiatan itu. Hal ini disebabkan karena masyarakatlah yang akan menikmati dan merasai manfaatnya.

Kalau masing-masing kegiatan itu dideteksi manfaatnya maka tentunya memerlukan waktu untuk membahasnya. Untuk itu, dalam penelitian ini hanya diungkapkan lewat pengelompokan atas tiga kegiatan berdasarkan tanggung jawab koordinator.

Kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab ketua umum diharapkan akan memberikan manfaat yang besar bagi anggota masyarakat. Baik manfaat dalam pembangunan mental lewat kegiatan agama, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila serta melalui kegiatan pendidikan dan penerangan maupun manfaat

dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kehidupan yang aman dan tentram melalui kegiatan keamanan, ketertiban dan ketentraman. Akan tetapi dari masing-masing kegiatan itu tentunya memberikan manfaat yang berbeda-beda bagi anggota masyarakat sesuai pengalaman masing-masing anggota masyarakat itu. Dan dapat diketahui lewat persepsi mereka.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap responden diperoleh data sebagai berikut.

TABEL 8
PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN YANG BERADA DIBAWAH TANGGUNG JAWAB KETUA UMUM LKMD.

(n = 16)

No.	Bidang kegiatan Ketua Umum LKMD	Persepsi responden		
		Bermanfaat	Kurang ber- manfaat	Tidak ber- manfaat
1	Keagamaan	66 (100)	- (-)	- (-)
2	Tahap perancangan kebutuhan/kegiatan	44 (72,7)	18 (27,3)	- (-)
3	Keamanan, keten- traman dan keter- tiban	14 (21,1)	52 (78,8)	- (-)
4	Pendidikan & penerangan	51 (77,2)	15 (22,8)	- (-)

Sumber : Olahan data primer, Desember 1990.

Jika data dalam tabel di atas dihitung secara rata-rata maka 67,8 % kegiatan yang diselenggarakan oleh ketua umum Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) bermanfaat bagi masyarakat. Persentase demikian itu tersebar dalam 4 kegiatan yaitu kegiatan keagamaan dalam persentase sebesar 100 %; kegiatan P4 sebesar 72 %, kegiatan keamanan sebesar 21,2 % dan kegiatan pendidikan % penerangan sebesar 77,2 %. Disamping besarnya manfaatnya yang diperoleh masyarakat, juga kegiatan-kegiatan itu oleh masyarakat dinyatakan kurang bermanfaat sebesar 32,2 % dimana yang kurang bermanfaat terbesar adalah kegiatan menyangkut keamanan yaitu sebesar 78,8 %.

Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab ketua I, persepsi masyarakat terhadap manfaatnya seperti terlihat pada tabel berikut :

TABEL 9

PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN YANG BERADA DI BAWAH TANGGUNG JAWAB KETUA I (n = 66)

No.	Bidang kegiatan Ketua I	Persepsi responden		
		Bermanfaat	Kurang ber- manfaat	Tidak ber- manfaat
1	Lingkungan hidup	1 (1,5)	60 (90,9)	5 (7,6)
2	Pembangunan eko- nomi	5 (7,7)	56 (84,8)	5 (5,6)

Sumber : Olahan data primer, Desember 1990.

Disini nampak bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab ketua I LKMD kurang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini ditunjukkan, oleh kegiatan manfaat sebesar 1,5 % dan malah 7,6 % mengatakan tidak bermanfaat.

Begitupula halnya dengan kegiatan pembangunan ekonomi, ternyata para responden menyatakan kurang bermanfaat sebanyak 84,8 % dari sejumlah responden selurunya.

Dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab ketua II LKMD seperti nampak dalam tabel berikut :

TABEL 10

PERSEPSI RESPONDEN TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN YANG BERADA DI BAWAH TANGGUNG JAWAB KETUA II LKMD (n = 66)

No.	Bidang kegiatan Ketua II LKMD	Persepsi responden		
		Bermanfaat	Kurang ber- manfaat	Tidak ber- manfaat
1	Kesehatan & kepen- dudukan	56 (87,8)	8 (12,1)	- (-)
2	Pemuda, olah raga dan kesenian	34 (51,5)	32 (48,4)	- (-)
3	Kesejahteraan sosial	37 (56,0)	39 (43,9)	- (-)
4	PKK	60 (90,9)	6 (9,0)	- (-)

Sumber : Olahan data primer, Desember 1990.

Ternyata secara rata-rata (71,55 %) kegiatan yang dilaksanakan oleh Ketua II Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan itu menyangkut kegiatan kesehatan dan kependudukan dimana 87,8 % responden menyatakan demikian.

Pernyataan yang sama ditujukan kepada kegiatan pemuda, olah raga dan kesenian sebesar 51,5 %; kegiatan kesejahteraan sosial sebesar 56,0 % dan kegiatan PKK sebesar 90,9 %.

Dengan demikian terungkaplah persepsi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja Kabupaten Daerah Tingkat II Enrekang.

C. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan LKMD di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja.

Sesuai analisis penulis dari berbagai data yang diperoleh begitupun melalui pengamatan langsung di lapangan bahwa yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Lakawan adalah :

1. Kesadara masyarakat.

Aspek kesadaran berpartisipasi sebagai salah satu aspek dominan, juga merupakan aspek penentu

derajat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Dimisalkan suatu daerah dimana penduduknya memiliki potensi atau kemampuan berswadaya yang cukup tinggi disertai aparatur pemerintahan yang cukup potensial, belum tentu mampu mengelola program pembangunan seperti diharapkan, bila dikalangan masyarakat terdapat sikap acuh tak acuh atau menentang program tersebut. Keadaan ini sangat membahayakan kelangsungan pembangunan, sebab tanpa atau kurangnya partisipasi masyarakat akan berakibat pincangnya roda pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dalam konteks pembangunan dewasa ini, aspek kesadaran partisipasi masyarakat tentu sangat diperlukan. Mengingat pembiayaan terutama diharapkan swadaya masyarakat sendiri, disamping bantuan dari pemerintah.

Dalam pada itu perlu diungkapkan bahwa partisipasi merupakan suatu proses mental, dimana anggota masyarakat turut secara aktif mengembangkan inisiatif, kreasi, tenaga serta bentuk sumbangan sifatnya material, dalam suatu kegiatan bersama dan membagi tanggung jawab sesuai fungsi dan peranan masing-masing anggota. Dengan demikian partisipasi merupakan salah satu pola sikap individu terhadap lingkungan sosialnya. Oleh karena itu dapat

disimpulkan bahwa sikap atau respon warga masyarakat terhadap kegiatan pembangunan desa/-kelurahan ditentukan oleh kepentingan mereka dalam kegiatan-kegiatan itu. Suatu pembangunan akan berhasil tergantung dari masyarakat itu sendiri.

2. Adanya sistem komunikasi dua arah.

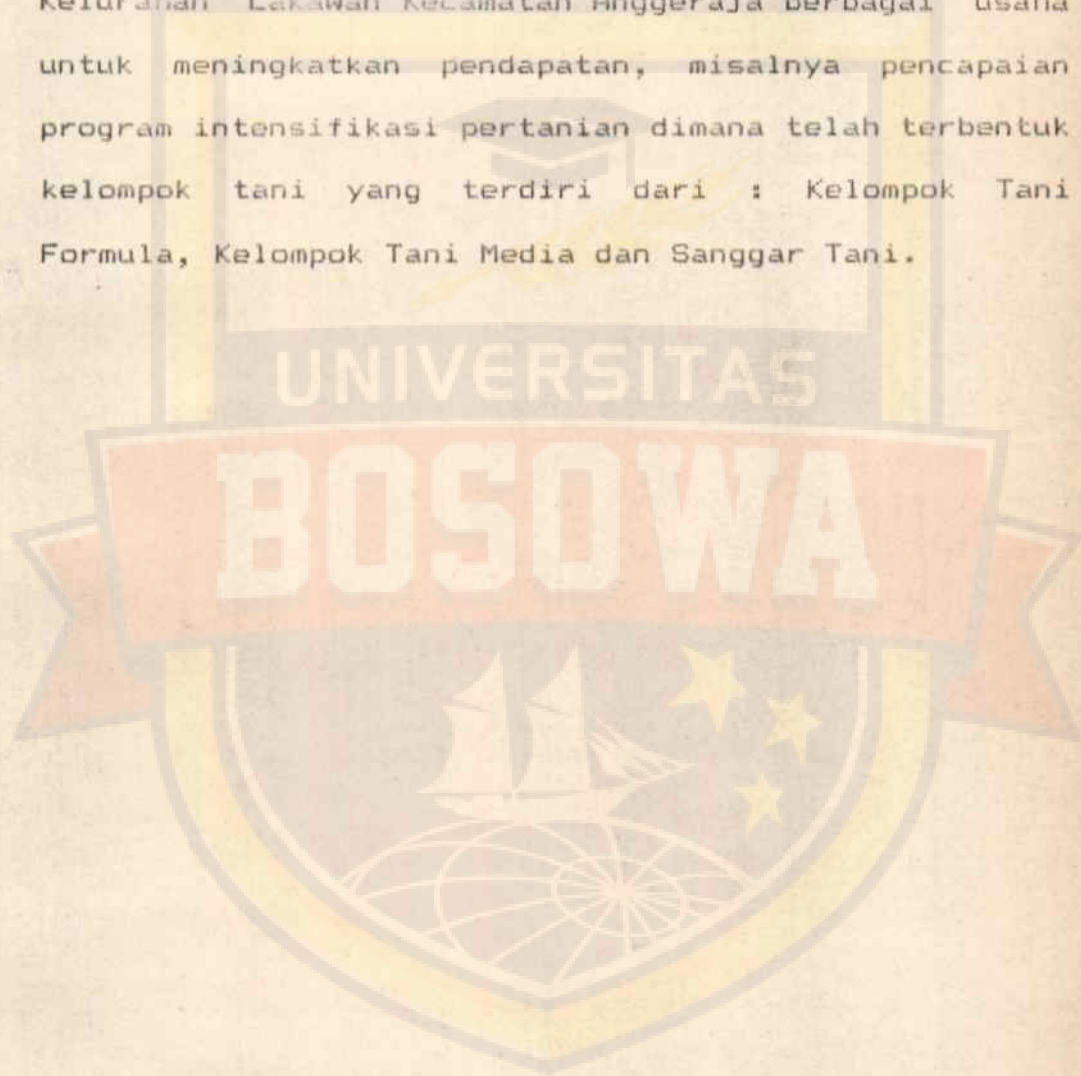
Dalam era pembangunan dewasa ini, faktor komunikasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan yang sedang dilaksanakan sebab kapan komunikasi tidak berjalan lancar maka pembangunan akan macet.

Komunikasi dapat berlangsung antara tokoh masyarakat atau pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dengan pemerintah dan terciptanya keterpaduan yang harmonis antara instansi-instansi dan unsur tripica kecamatan. Apabila komunikasi kurang harmonis, maka akibatnya pemerintah dalam menerapkan kebijaksanaan atau keputusan mengalami kesulitan, begitupun sebaliknya bilamana komunikasi berjalan lancar antara semua pihak maka pelaksanaan pembangunan juga akan berjalan lancar.

3. Potensi Ekonomi.

Dengan adanya potensi ekonomi yang cukup banyak, baik yang sudah maupun yang belum dikelola,

pada dasarnya merupakan inspirasi pelaksanaan pembangunan dan sekaligus merupakan modal dasar untuk mendapatkan berbagai sumber dana yang diperlukan dalam rangka pembiayaan pembangunan. Seperti halnya di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja berbagai usaha untuk meningkatkan pendapatan, misalnya pencapaian program intensifikasi pertanian dimana telah terbentuk kelompok tani yang terdiri dari : Kelompok Tani Formula, Kelompok Tani Media dan Sanggar Tani.



BAB V

P E N U T U P

Dari bahasan atas hasil penelitian dapatlah ditarik kesimpulan untuk selanjutnya dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan.

1. Dari keanggotaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) terlihat bahwa lapisan-lapisan masyarakat yang ada tidaklah dicerminkan pada struktur keanggotaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), sehingga aspirasi masyarakat atas pembangunan yang diinginkan tidaklah tersalur semuanya dalam perencanaan yang dibuat.
2. Dari keterlibatan anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dalam tahapan perencanaan pembangunan pada akhirnya terlihat bahwa tidak berperannya semua anggota pada setiap tahap kegiatan. Secara rata-rata keterlibatan anggota LKMD dalam kegiatan perencanaan pembangunan hanyalah sebesar 41,7 %.
3. Dari keterlibatan anggota sebesar 41,7 % itu dapat memberi arti terhadap fungsi LKMD Kelurahan Lakawan hanya 41,7 % dari fungsi seharusnya.

4. *Proses* pelaksanaan pembangunan desa yang menjadi tanggung jawab Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Lakawan secara administratif berjalan secara baik, namun dalam pembangunan tugas dan tanggung jawab tidak mencerminkan adanya pembagian kerja sebab segala sesuatu terpusat pada kebijaksanaan lurah yang dalam kedudukannya menjadi ketua LKMD Kelurahan Lakawan.
5. *Persepsi* persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawab ketua umum LKMD mengatakan 67,8 % manfaatnya bagi kehidupan masyarakat desa. Namun dalam persentase sebesar itu, bidang kegiatan agama menempati tempat teratas, menyusul pendidikan dan penerangan serat pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Kegiatan dibidang keamanan dinilai kurang bermanfaat, masyarakat hanya memberikan persentase sebesar 21,2 % atas manfaatnya.
6. *Persepsi* persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawab ketua I LKMD ternyata menunjukkan 90,9 % kurang bermanfaat untuk kegiatan lingkungan hidup dan 84,8 % kurang bermanfaat untuk kegiatan pembangunan ekonomi.
7. *Persepsi* persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang menjadi tanggung jawab ketua II Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ternyata menunjukkan 71,55 %

bermanfaat bagi masyarakat dimana kegiatan itu meliputi kegiatan kesehatan dan kependudukan, pemuda & olah raga; kesejahteraan sosial dan PKK.

- B. kendala yang dihadapi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja adalah bersumber dari kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi yang kurang, sistem komunikasi dua arah yang kurang dan potensi ekonomi Kelurahan Lakawan.

B. Saran-saran.

Disarankan agar :

1. Kegiatan keamanan, ketentraman dan ketertiban perlu ditingkatkan serta dimasyarakatkan kegunaannya melalui penerangan agar persepsi masyarakat akan pentingnya kegiatan tersebut meningkat.
2. Kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi lebih ditujukan untuk hal-hal yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa.